

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Akuntansi**

Luca Paciolo adalah seorang matematikawan yang berhasil menemukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan pada tahun 1494 (Gie, 2020). Akuntansi mengambil peran penting dalam memengaruhi perniagaan dan tatanan sosial negara. Keputusan-keputusan yang diterima oleh perseorangan maupun badan usaha lain ditentukan dalam pemanfaatannya pada sumber daya yang dikuasai oleh negara. Akuntansi diterapkan hampir di segala aktivitas bisnis untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis. *Accounting* menurut (Reeve et al., 2009) yaitu Akuntansi adalah komposisi data yang menyajikan laporan kepada pengguna tentang aktivitas ekonomi dan kondisi usaha.

Berdasarkan pendapat tersebut mengungkapkan bahwa akuntansi bermanfaat dalam memberikan informasi atas kegiatan ekonomi dari suatu perusahaan maupun institusi untuk disampaikan kepada individu yang berkaitan. (Sunarno Sastroatmodjo & Purnairawan, 2021) berpendapat bahwa, akuntansi diartikan sebagai prosedur pencatatan, kategorisasi, perumusan terhadap transaksi usaha yang dilakukan secara teratur dan berurutan disajikan berwujud laporan keuangan

yang bermanfaat bagi individu yang membutuhkan laporan keuangan itu sebagai langkah dalam menentukan keputusan.

Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 menyatakan akuntansi ialah kegiatan pelayanan yang memperkenalkan informasi kuantitatif, terutama yang moneter, tentang unsur-unsur keuangan yang direncanakan untuk menjadi berharga dalam navigasi moneter dalam menetapkan keputusan yang (Nofianti, 2012).

Akuntansi pada umumnya dianggap sebagai suatu aktivitas pelayanan yang menyuguhkan informasi terukur terkait kondisi finansial dan hasil kegiatan perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomis. Pengertian ini menggarisbawahi peranan akuntansi, yaitu untuk menyuguhkan informasi bagi kepentingan para konsumen sebagai bekal pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Hutagaol, 2012)

Menurut (Taslim & Pratama, 2021) awal mula menghasilkan fakta keuangan, organisasi perlu membuat strategi untuk mencatat, kategorisasi, pengamatan, serta pengelolaan transaksi dan juga aktivitas-aktivitas perdagangan, kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi meliputi:

- 1) Membedakan dan memperkirakan informasi yang berlaku untuk pengambilan keputusan.
- 2) Penanganan informasi yang bersangkutan kemudian merinci data-data selanjutnya.
- 3) Menyampaikan data ke laporan klien.

## 2.2 PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK merupakan sebuah tatanan petunjuk untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisikan aturan yang berkaitan dengan pencatatan, pembentukan, penelaahan, serta penyuguhan laporan keuangan (Virtina Thionita, 2019). Di Indonesia PSAK berbasis IFRS (*International Financial Accounting Standard*) mulai diterapkan pada tahun 2012. IFRS (*International Financial Accounting Standard*) sendiri adalah pedoman akuntansi internasional modern yang sebelumnya merupakan kumpulan beberapa standar yang dikenal dengan *International Accounting Standard (IAS)*.

Saat ini, ada beberapa macam pedoman pembukuan yang diterapkan di Indonesia. Semuanya telah diterapkan oleh elemen lokal yang berbeda, baik pemerintah maupun swasta. Kelima jenis PSAK tersebut yaitu:

### 1) PSAK IFRS

Merupakan panduan pertama yang legal di Indonesia. IFRS tersebut akan perusahaan yang akuntabel gunakan secara umum. Sehingga, badan usaha yang menggunakan IFRS biasanya sudah tercatat sebagai emiten dalam bursa efek (Kristianti, 2022).

### 2) Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Dipergunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang jelas dan merilis laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP merupakan SAK yang

berdiri sendiri dan tidak berpedoman pada SAK Umum. Bentuk kontrol yang lebih umum dalam hal perlakuan akuntansi dan kebanyakan tidak berubah selama beberapa tahun(IKATAN AKUNTAN INDONESIA, 2016).

### 3) Standar Akuntansi Syariah (SAS)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan memegang teguh fatwa MUI(IKATAN AKUNTAN INDONESIA, 2022).

### 4) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terstruktur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP(Singkali & Widuri, 2017).

### 5) SAK EMKM

SAK EMKM siap untuk memenuhi kebutuhan detail moneter pada UKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dapat menjadi rujukan dalam penetapan dan pemberian ekstensi kuantitatif EMKM. Standar ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh organisasi yang lalai memenuhi pedoman pembukuan yang ditetapkan dalam SAK ETAP (Kristianti, 2022).

### 2.3 Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 pada bab 1, pasal 1 dijelaskan pengertian tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah adalah (Republik Indonesia, 2008):

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.

Menurut Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1995, pengertian Usaha Kecil Menengah adalah (Republik Indonesia, 1998) :

- 1) Pasal 1 ayat 1

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

2) Pasal 1 ayat 2

Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.

Definisi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja menurut BPS (2013), usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima orang sampai dengan 19 orang. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Sedangkan, menurut M.Kwartono yang dikutip oleh (Redaksi OCBC NISP, 2021), pengertian UMKM adalah pergerakan moneter individu yang memiliki total aset paling ekstrim sebesar Rp200 juta, dimana lingkungan usaha tanah dan bangunan dikecualikan dari hitungan.

#### **2.4 Kriteria dan Klasifikasi UMKM**

Berdasarkan UU 20 tahun 2008 Bab IV pasal 6, dijelaskan bahwa kriteria UMKM dibagi berdasarkan kekayaan bersih dan omset penjualan yang diperoleh selama setahun. Kriteria masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

World Bank menggunakan tiga kriteria kuantitatif untuk mendefinisikan UMKM yakni: jumlah karyawan, neraca tahunan (aset) dalam dolar US dan omset dalam dolar US (Yazfinedi, 2018). World Bank, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

1) *Medium*, dengan kriteria :

- a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang

- b. Pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta
  - c. Jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta
- 2) *Small*, dengan kriteria :
- a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
  - b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta
  - c. Jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta
- 3) *Micro*, dengan kriteria :
- a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
  - b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 100 ribu
  - c. Jumlah aset tidak melebihi \$ 100 ribu

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu (Rijanto, 2015):

- 1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- 2) UMKM Mikro adalah UMKM dengan kapasitas ahli belum tentu memiliki jiwa perintis untuk mendorong bisnis mereka.
- 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang dilengkapi untuk usaha bisnis dengan meletakkan kolaborasi (menoleransi tenaga kerja sub-sementara) dan komoditas
- 4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang memiliki kewirausahaan berkualitas dan siap bertransformasi menjadi usaha besar.

## **2.5 Asas dan Tujuan UMKM**

Berlandaskan pada UU RI 20/2008, UMKM memiliki asas sebagai berikut:

- 1) kekeluargaan;
- 2) demokrasi ekonomi;
- 3) kebersamaan;
- 4) efisiensi berkeadilan;
- 5) berkelanjutan;
- 6) berwawasan lingkungan;
- 7) kemandirian;
- 8) keseimbangan kemajuan; dan
- 9) kesatuan ekonomi nasional.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berdasarkan ekonomi berkeadilan.

## **2.6 SAK EMKM**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2009. Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi di Indonesia yang menyebabkan dibutuhkan standar akuntansi yang lebih mudah serta keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan dengan SAK umum berbasis IFRS dan ETAP, DSAK IAI mengesahkan SAK EMKM pada tahun 2016.

Banyak penelitian telah memeriksa bahwa beberapa UMKM belum menerapkan SAK ETAP secara tegas, mengingat fakta bahwa standar tersebut

dipandang terlalu rumit dan tidak sebanding dengan kebutuhan para aktivis UMKM, riset-riset tersebut menganjurkan penyusunan laporan keuangan yang lebih proporsional. Sehingga Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan SAK EMKM yang diharapkan dapat membantu urutan pelaporan dalam melakukan transisi dari pelaporan yang menganut basis akrual (Janros, 2018).

SAK EMKM mulai berlaku efektif per 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Pemberlakuan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

## **2.7 Laporan Keuangan menurut SAK EMKM**

### **2.7.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah bukti keuangan yang dibuat berdasarkan keuangan entitas bisnis yang berisikan laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca, untuk disampaikan pada akhir periode akuntansi. Menurut (Horngrén & Jr, 2007) Laporan keuangan adalah sebuah catatan organisasi yang melaporkan sebuah organisasi dalam hal keuangan yang memberikan data untuk membantu orang menetap pada pilihan bisnis dalam pandangan data tersebut.

Pengertian laporan keuangan menurut Psak No. 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015) adalah “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menyajikan sejarah yang dievaluasi dari elemen dalam nilai moneter. Berdasarkan SAK EMKM (Ikatan

Akuntan Indonesia, 2016), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.

(Nurlaila, 2018) mengungkapkan bahwa tujuan penyajian laporan keuangan oleh sebuah entitas dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Untuk memberikan data moneter yang dapat diandalkan sehubungan dengan sumber keuangan dan kewajiban dan modal organisasi.
- 2) Untuk memberikan data yang solid tentang perubahan aset keuangan organisasi yang muncul dalam aktivitas bisnis untuk keuntungan.
- 3) Untuk memberikan data keuangan yang membantu klien laporan untuk menilai kemampuan organisasi dalam menciptakan keuntungan di masa depan..

### **2.7.2 Komponen Laporan Keuangan**

Berdasarkan SAK EMKM pada paragraph 3.9 terkait Laporan Keuangan menyatakan bahwa suatu laporan keuangan harus memiliki tiga bentuk laporan keuangan, yaitu Laporan Posisi Keuangan pada Akhir Periode, Laporan Laba Rugi Selama Periode, dan Catatan atas laporan keuangan.

Berikut ini adalah penjelasan tentang tiga bentuk laporan keuangan tersebut :

- 1) Laporan Posisi Keuangan pada Akhir Periode

SAK EMKM paragraf 4.1 menjelaskan bahwa laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Informasi terkait akun-akun tersebut didefinisikan sebagai berikut :

a. Aset

Aset merupakan sumber daya yang diakui oleh entitas yang berasal dari kegiatan transaksi di masa lalu dan diharapkan memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Aset dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni aset lancar dengan aset tidak lancar. Berdasarkan SAK EMKM paragraf 4.6, Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
- b) dimiliki untuk diperdagangkan;
- c) diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- d) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Apabila suatu aset tidak memenuhi keempat kriteria diatas maka aset akan dianggap sebagai aset tidak lancar.

b. Liabilitas

Liabilitas adalah sebuah kewajiban yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis, yang dimana entitas bisnis tersebut diharuskan membayar hutang yang terjadi akibat

kegiatan transaksi di masa lalu. Hutang tersebut dilakukan oleh entitas bertujuan untuk mencukupi kebutuhan operasional bisnis yang sedang dijalani. Liabilitas dibedakan menjadi dua jenis yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Berdasarkan SAK EMKM paragraf 4.6, Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
- b) dimiliki untuk diperdagangkan;
- c) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- d) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Apabila sebuah liabilitas tidak memenuhi ketiga kriteria diatas maka akan akan sebagai liabilitas jangka panjang.

### c. Ekuitas

Menurut SAK EMKM paragraf 2.7, definisi ekuitas yaitu hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim atas entitas yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

### 2) Laporan Laba Rugi Selama Periode

Merupakan jenis laporan keuangan yang memuat data keuangan mengenai kegiatan usaha suatu entitas yang terdiri dari penghasilan dan beban dalam suatu periode akuntansi. Penghasilan dan beban termasuk hal yang penting bagi suatu

entitas demi kelancaran kegiatan usaha yang sedang dilakoni. Dengan mengetahui penghasilan dan beban, entitas dapat mengetahui untung dan rugi usahanya selama periode tertentu. Berikut penjelasan terkait penghasilan dan beban :

a. Penghasilan (*income*)

SAK EMKM paragraf 2.24 menjelaskan bahwa, penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Lalu pada paragraf 2.10 dijelaskan bahwa, penghasilan (*income*) dibagi menjadi 2, yakni pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

b. Beban (*Expense*)

SAK EMKM paragraf 2.25 menjelaskan bahwa, beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Lalu pada paragraf 2.11 SAK EMKM dijelaskan bahwa, beban (*Expense*) dibedakan menjadi 2, yakni beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal dan beban kerugian.

3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan

keuangan(Kartika & Puspaningrum, 2021). Pada paragraf 6.2 SAK EMKM, catatan atas laporan keuangan memuat:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi;
- c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pembaca laporan keuangan.